

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2019





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2019

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dituangkan dalam “**Kinerja BPOM Dalam Angka**”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan *full spectrum* yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standarisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, beberapa kasus penting terkait pengawasan Obat dan Makanan telah ditemukan dan berhasil diungkap oleh BPOM dan menjadi perhatian besar di masyarakat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan dan dinamika perubahan lingkungan strategis, maka pengawasan Obat dan Makanan perlu diperkuat. Untuk itu, beberapa langkah strategis dilakukan BPOM dalam rangka transformasi menuju “BPOM baru”.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.



Jakarta, September 2019
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
HIGHLIGHT	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	4
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
II. Standardisasi.....	13
III. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	16
IV. Pengembangan Aplikasi e-BPOM.....	22
V. Perkuatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan	24
VI. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)	25
VII. Kerjasama Internasional	26
VIII. Pengelolaan Anggaran	29
IX. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM.....	29
PENUTUP	29
LAMPIRAN	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2019	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan II Tahun 2019	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2019	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2019	6
Gambar 5.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2019	7
Gambar 6.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2019	7
Gambar 7.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2019	8
Gambar 8.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2019	8
Gambar 9.	Profil Laporan Efek Samping s.d. Triwulan II tahun 2019	9
Gambar 10.	Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan	10
Gambar 11.	Produk yang Dimusnahkan	12
Gambar 12.	Total Posts by Network sampai dengan TW II 2019	16
Gambar 13.	Total Audience by Network Sampai dengan TW II 2019	16
Gambar 14.	Total Engagement by Network TW I 2019	17
Gambar 15.	Total Engagement by Network TW II 2019	17



BADAN POM

HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN II TAHUN 2019

Bersama Lintas Sektor, Badan POM Wujudkan Obat dan Makanan Aman

Medan / Senin (08/04/2019)

Bertempat di Medan, Badan POM melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 07-09 April 2019. Kepala Badan POM, Penny K. Lukito bersama Sekretaris Daerah, R. Sabrina yang mewakili Gubernur Sumatera Utara membuka acara secara resmi yang ditandai dengan pemukulan Gordang Sambilan secara serentak pada Senin (08/04). Dihadiri oleh Jajaran Pimpinan Daerah di Sumatera Utara, Perwakilan Masyarakat, dan Akademisi di Sumatera Utara, kegiatan yang merupakan agenda tahunan Badan POM ini juga diikuti oleh seluruh jajaran Badan POM baik di Pusat maupun Daerah.

Mengangkat tema Penguatan Insan Pengawas Obat dan Makanan Meningkatkan Pengembangan Industri Obat dan Makanan serta Perlindungan Masyarakat Menuju Indonesia Sejahtera, agenda utama pertemuan ini merupakan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tahun 2020 dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Rakernas juga bertujuan untuk menguatkan komitmen bersama antara Pusat dan Daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Badan POM dan 60 Negara Anggota Codex Godog Peraturan Terkait Cemaran Pangan

Yogyakarta / Senin (29/04/2019)

Badan POM menjadi tuan rumah pertemuan tahunan “The 13th Session Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)” bersama *World Health Organization (WHO)*, *Food and Agriculture Organization (FAO)*, dan *Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of Netherland*, yang diselenggarakan di Yogyakarta selama 5 hari yaitu tanggal 29 April – 3 Mei 2019. Pertemuan dihadiri oleh lebih kurang 250 orang peserta dari sekitar 60 negara anggota Codex.

Sidang CCCF ke-13 ini merupakan kali kedua Badan POM menjadi co-host penyelenggaraan sidang Codex setelah sebelumnya pada tahun 2014. Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan pada sidang kali ini antara lain: batasan Cadmium (Cd) pada coklat dan produk turunannya, Mycotoxins pada spices, Methylmercury pada ikan, Aflatoxins dalam sereal dan kacang-kacangan, Hydrogen Cyanide pada singkong dan produk turunannya, pengurangan 3-MCPDE dan Glycidyl esters dalam proses pemurnian minyak goreng dan produk turunannya.



Raih Penghargaan APIP Level 3 Penuh, Badan POM Terapkan Fraud Control Plan (FPC) Bersama BPKP



Jakarta / Kamis (02/05/2019)

Jakarta - Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan pencegahan korupsi, Badan POM telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Trusted Advisor* yang memberikan nilai tambah strategis melalui rekomendasi pengawasan intern yang efektif dan efisien.

Bertempat di Hotel Lumire, Jakarta, Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyerahkan Piagam Penghargaan Level 3 Penuh atas Kapabilitas APIP Badan POM. Penyerahan piagam yang diterima langsung oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito ini diadakan dalam rangkaian acara Lokakarya Reformasi Birokrasi, Pengendalian Kecurangan dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan POM, Kamis (02/05).

Bersama Lintas Sektor, Bdan POM Wujudkan Obat dan Makanan Aman

Semarang / Senin (20/05/2019)

Badan POM melalui 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan pangan secara intensif bersama lintas sektor terkait. Pengawasan ini dilaporkan secara bertahap setiap minggu dari 22 April hingga 7 Juni 2019. Target intensifikasi pengawasan difokuskan pada pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa, rusak, serta pangan jajanan berbuka puasa (takjil) yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna dilarang (rhodamin B dan methanyl yellow). Pada konferensi pers di Jakarta, Senin, 20 Mei 2019, yang dihadiri juga oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi serta Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya ini, Kepala Badan POM menyampaikan temuan pelanggaran pangan, yaitu produk kopi kedaluwarsa yang diubah tanggal kedaluwarsanya.



Bangun Kerjasama, Badan POM Kunjungi Daerah Perbatasan Vanimo, Papua Nugini

Papua Nugini / Rabu (19/06/2019)

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) SKOUW serta melakukan kunjungan ke RS Vanimo di Papua Nugini (19/06) dalam rangka meningkatkan pengamanan produk obat dan kemitraan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto; Konsulat Jendral RI di Vanimo, Abrahah Lebelauw; Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai; serta Kepala Administrator PLBN Skouw, Yan Z. Numberi

Penny K. Lukito menyampaikan bahwa Badan POM mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat Indonesia melalui pengawasan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan.



Jaga Transparansi, BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2018

Jakarta / Senin (24/06/2019)

Badan POM kembali mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini mendapat apresiasi dari Anggota VI BPK, Prof. Dr. Harry Azhar Azis, MA pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2018 Pada Lingkungan AKN VI bertempat di Auditorium BPK.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menegaskan bahwa Badan POM terus berkomitmen dalam pengelolaan kekayaan negara sesuai ketentuan yang berlaku dan akan terus memperbaiki, membenahi, menjaga, memaksimalkan pengelolaan keuangan negara sebagai wujud pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, BPOM juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK khususnya kepada Bapak Auditor Utama Keuangan Negara VI beserta tim dari Auditorat Keuangan Negara VI atas pendampingan dan pengawalan selama pelaksanaan pemeriksaan.





BADAN POM

**HASIL KEGIATAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN**

s.d. TRIWULAN II TAHUN 2019

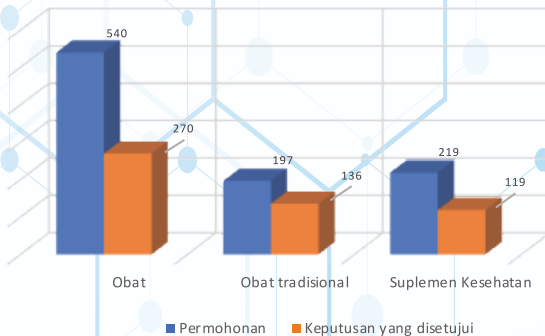
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

Pengawasan *pre-market*

Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.



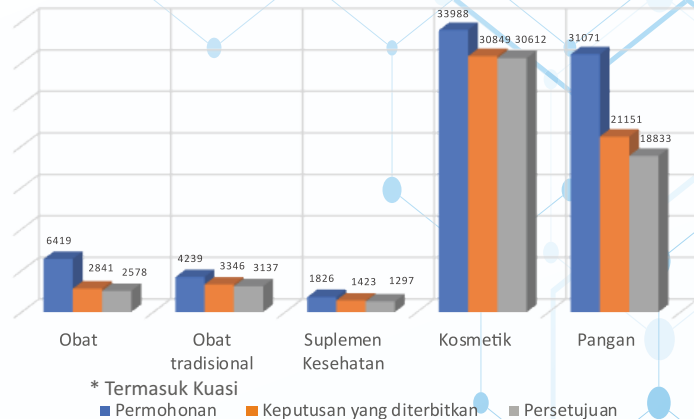
Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, telah diterbitkan **59.610** keputusan dan **56.457** persetujuan izin edar dari **77.543** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan II Tahun 2019



Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, dari 956 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 525 (54.92%) iklan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2019

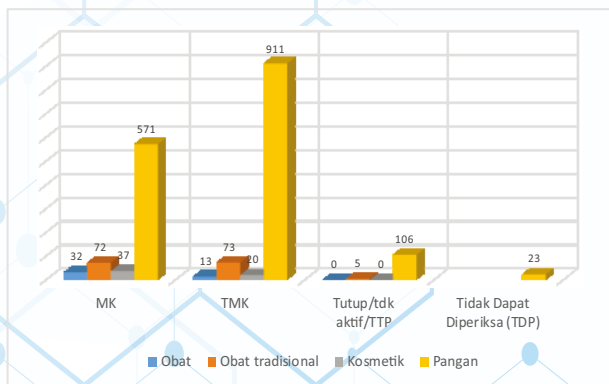
Pengawasan post-market

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui:

1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

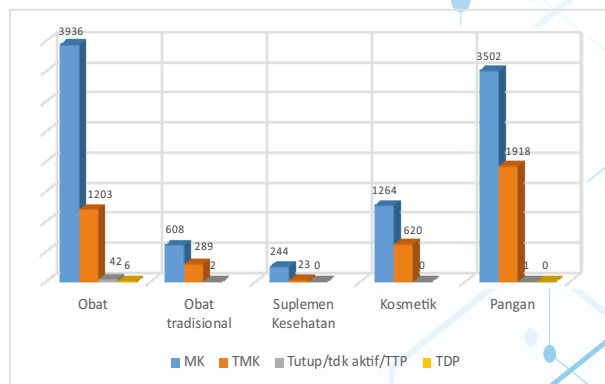
BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019 telah diperiksa sebanyak **1.863 sarana produksi** Obat dan Makanan dengan **1.017 (54.59%)** sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2019

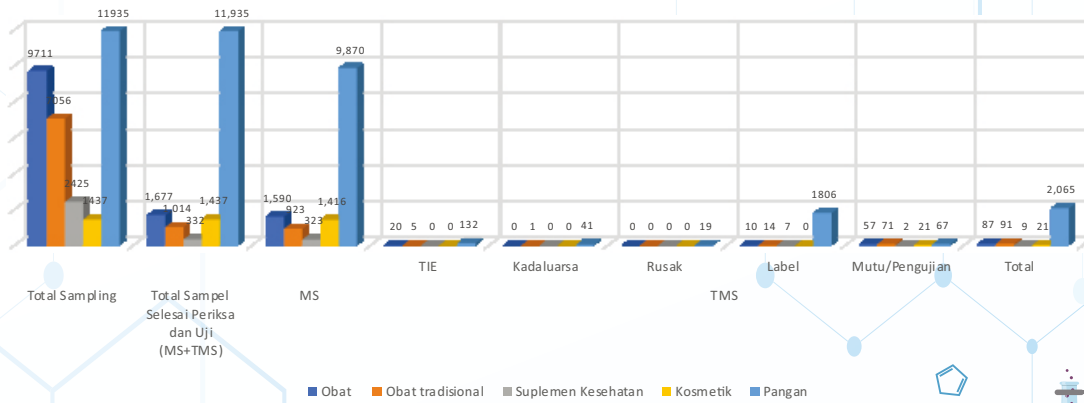
Sampai dengan Triwulan II tahun 2019 telah diperiksa **13.658 sarana distribusi** Obat dan Makanan dengan **4.053 (29.67%)** sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2019

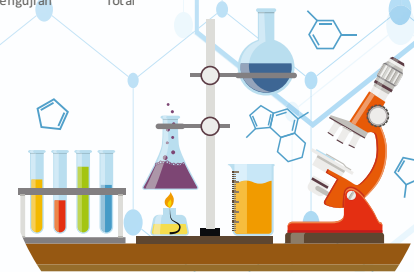
Ket:
MK = Memenuhi Ketentuan
TMK = Tidak Memenuhi Ketentuan





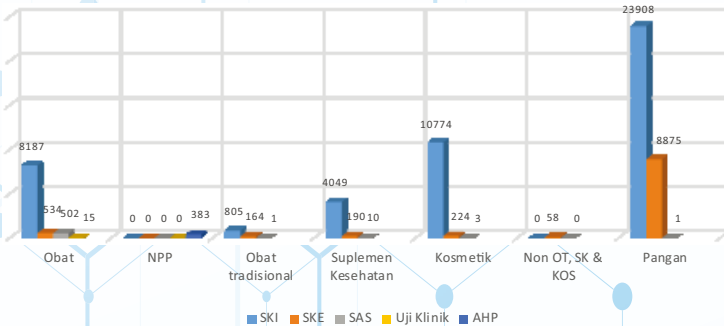
Ket:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa Izin Edar

Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2019



Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, dari 32.564 sampel yang disampling terdapat 16.395 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dimana 14.122 (86.14%) sampel memenuhi syarat.

3 Sertifikasi



Gambar 6. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2019

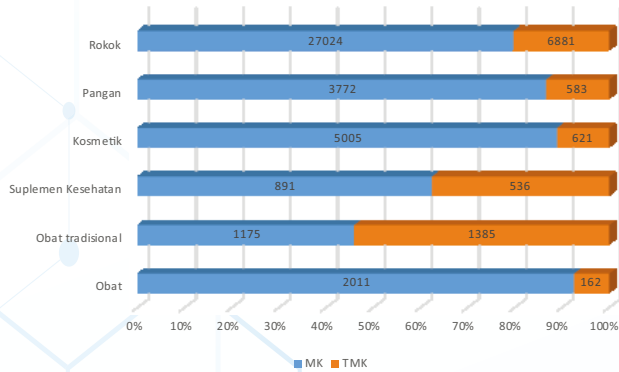
Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia,



BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan Surat Keterangan Impor (SKI), SAS (Special Access Scheme), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2019 telah diterbitkan 47.723 SKE, 10.045 SKI, 517 SAS, 15 Uji Klinik, dan 383 AHP Obat dan Makanan.

Pengawasan Iklan

4



Gambar 7. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2019



Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, dari 40.209 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 33.280 (71%) iklan memenuhi ketentuan.

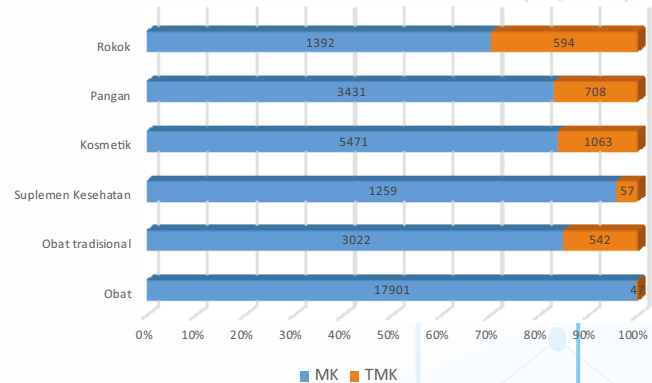


BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan II tahun 2019,

dari 34.653 label Obat dan Makanan yang diawasi, 31.863 atau sekitar 91.95% label memenuhi ketentuan.

5

Pengawasan Label



Gambar 8. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2019

6

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia :

- ⦿ MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmokologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- ⦿ MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Tindaklanjut	Persentase
Obat	3,265	2450	75.04
Obat Tradisional	147	144	97.96
Suplemen Kesehatan	19	18	94.74
Kosmetik	222	71	31.98

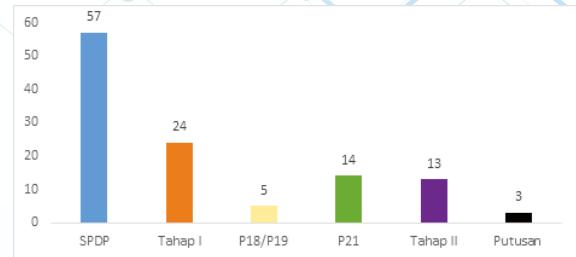
Gambar 9. Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan II tahun 2019



II

Hasil Investigasi Awal dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan II pada tahun 2019, PPNS BPOM telah menindaklanjuti perkara sebanyak 116 perkara. Dari 116 perkara tersebut, 57 perkara masih dalam tahap SPDP, 24 perkara pada tahap I, 5 Perkara pada tahap P19/P18, 14 Perkara pada tahap P21, 13 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap 2) dan 3 perkara yang sudah mendapatkan putusan pengadilan.



Gambar 10. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan

Operasi Opson VIII



Operasi Opson merupakan operasi global di bawah koordinasi *International Criminal Police Organization (ICPO)-INTERPOL, Lyon*, Perancis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberantas jaringan kejahatan terorganisir di balik perdagangan pangan segar dan pangan olahan ilegal, dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan, meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum maupun pihak berwenang yang terlibat, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pangan ilegal dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan.

Dalam Operasi Opson VIII yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2019, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM Pusat dan Daerah, Ditjen Bea & Cukai, serta Kementerian Pertanian serentak melakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan penindakan sarana produksi dan distribusi pangan segar dan pangan olahan di seluruh Indonesia. BPOM menyita 1.606 item (826.929 pcs) pangan segar dan pangan olahan ilegal dan tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dari 425 sarana yang diperiksa dengan nilai keekonomian 61 miliar rupiah. Temuan didominasi snack (biskuit, wafer, dll) yang sudah kedaluwarsa kemudian dikemas ulang oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Operasi Pemberantasan Kosmetik Ilegal

Di awal tahun 2019, BPOM berhasil menyita dan mengamankan kosmetik tanpa izin edar/ilegal di wilayah Jakarta Barat. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM dan Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, menggerebek empat lokasi yang diduga memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal termasuk palsu di Perumahan Taman Surya, Ruko Daan Mogot Baru, Komplek Citra Business Park, dan Taman Surya Molek.

Dari empat lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai barang bukti antara lain bahan baku kosmetik, bahan kemasan, produk ruah, produk jadi kosmetik, alat produksi, kendaraan, dan dokumen dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai 30 miliar rupiah. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah mengemas kembali sabun lokal yang memiliki izin edar BPOM menjadi seolah-olah produk impor dengan merek kosmetik terkenal dan memproduksi kosmetik palsu. Distribusinya tidak hanya di pulau Jawa, tetapi sampai ke kota-kota besar di Pulau Kalimantan dan Sulawesi seperti Banjarmasin dan Makassar.

Dari hasil pengungkapan, diketahui bahwa tersangka yang berinisial DJ telah melakukan bisnis kosmetik ilegal di lokasi tersebut sejak awal 2018, diperkirakan omzet yang didapatkan mencapai 200 juta rupiah per bulan.

Jumlah yang kami temukan sebanyak 53 item terdiri dari 679.153 pcs produk dengan nilai keekonomian mencapai 30 miliar rupiah.



Operasi Pemberantasan Pangan Kadaluwarsa

Berdasarkan hasil pendalaman informasi yang dilakukan oleh PPNS ditemukan sarana ilegal berupa gudang dan rumah di Kampung Bulak Kota Depok yang diduga mengganti tanggal kedaluwarsa terhadap pangan olahan. Dari kedua lokasi tersebut, ditemukan sebanyak 92 item terdiri dari 135.737 pcs produk dengan nilai keekonomian mencapai 1,27M.

Operasi Pemberantasan Kosmetik Tanpa Izin Edar

Berdasarkan hasil pendalaman informasi yang dilakukan oleh PPNS ditemukan sarana ilegal berupa gudang dan rumah di Komplek Inkopad Blok G7 No 10, Kel. Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat yang diduga memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal. Dari kedua lokasi tersebut, ditemukan sebanyak 14 item terdiri dari 230.968 pcs produk dengan nilai keekonomian mencapai 7,5M.

Dari kedua lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai barang bukti antara lain bahan baku kosmetik, bahan kemasan, produk ruah, produk jadi kosmetik, alat produksi, alat komunikasi dan dokumen.

Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal

Sebagai salah satu upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan ilegal, BPOM telah melaksanakan pemusnahan obat dan makanan ilegal dari hasil kegiatan penyidikan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, pemusnahan dilakukan oleh beberapa Balai/ Balai Besar POM seluruh Indonesia sebagai berikut :

No	Balai Besar/Balai POM	Tanggal	Produk yang Dimusnahkan		
			Jumlah Item	Jumlah Pieces	Total Nilai (Rp)
1	Banda Aceh	20 Maret 2019	1.656	192.761	Rp1.263.303.200
2	Jakarta	26 April 2019	875	61.092	Rp13.000.000.000
Jumlah			2.531	253.853	Rp14.263.303.200



Gambar 11. Produk yang Dimusnahkan



II. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.



Obat

Telah disusun 13 standar obat, dimana 5 (lima) standar progresnya mencapai lebih dari 50% yaitu:

1. Standar Obat Non Kompendial mengakomodir Standar mutu obat zat aktif baru yang belum ada di Farmakope (94,29%)
2. Revisi PerBPOM No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Indonesia (85,71%)
3. Revisi Peraturan Kepala BPOM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (76,92%)
4. Peraturan BPOM Pelaporan Kegiatan Produksi Industri Farmasi (60%)
5. Peraturan BPOM Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat (55,56%)



Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Telah disusun 10 standar obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, dimana 8 standar progresnya mencapai lebih dari 50% yaitu:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Penerapan CPOTB Secara Bertahap Bagi UMKM OT (70%)
2. Kajian Kategori Produk Kombucha (100%)
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan (100%)
4. Pedoman Penilaian Suplemen Kesehatan Yang Mengandung Probiotik (80%)
5. Peraturan BPOM tentang Pengawasan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (60%)
6. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.42.06.10.4556 Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (80%)
7. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika (80%)
8. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Izin Produksi Golongan B (80%)

Telah disusun 19 kajian obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, dengan progress mencapai 100% yaitu:

1. Kajian Obat Tradisional mengandung Kafein (100%)
2. Kajian Bahan Tambahan Baru Laurocapram (100%)
3. Kajian Bahan Aktif Metil Nikotinat(100%)
4. Kajian Pencantuman Peringatan / Perhatian untuk Produk yang Mengandung Centella Asiatica p (100%)
5. Kajian mengenai Peringatan/Perhatian untuk Produk yang Mengandung Valeriana officinalis radix (100%)
6. Kajian Kandungan Tanaman Mengandung Kafein (100%)
7. Kajian Bahan Baku Aktif Arachis hypogea skin (100%)
8. Kajian Bahan Baku Aktif dari Antherea pernyi Geurin-Meneville (Pupa Ulat Sutra) (100%)
9. Kajian Permohonan Informasi tentang Kategori Produk Lancure dan Artimax (100%)
10. Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Bahan Baru Polypodium leucotomos (PL) Extract dalam Produk Suplemen Kesehatan (100%)
11. Kajian tentang Penggunaan Istilah Nutrasetikal pada Produk Suplemen Kesehatan (100%)
12. Kajian Plasenta Rusa sebagai Bahan Suplemen Kesehatan (100%)
13. Kajian Produk Kombinasi Caffeine, L-Theanine, dan Taurine dalam Minuman Berenergi (100%)
14. Kajian Regulasi Produk Nutrisi Oral untuk Pasien Malnutrisi dengan Kondisi Gangguan Tertentu (100%)
15. Kajian Kombinasi Baru Hyaluronic Acid dan Boswellia serrata (100%)
16. Kajian Klaim Produk Suplemen Kesehatan yang Mengandung Membran Ganggang Telur (100%)
17. Kajian Tentang IFRA (100%)
18. Kajian tentang Halykoo (100%)
19. Kajian tentang Kosmetika Hotel (100%)



Pangan

Telah disusun 14 peraturan, standar, maupun pedoman pangan olahan, dimana 10 standar progresnya mencapai 50% yaitu:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan (50%)
2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus (50%)
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial yang Disterilisasi setelah Dikemas (50%)
4. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa (50%)
5. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan (50%)
6. Pedoman Formaldehide Alami pada Pangan (50%)
7. Pedoman tentang Kemasan Daur Ulang (50%)
8. Pedoman Label Pangan Olahan (50%)
9. Pedoman Perhitungan Karakteristik Dasar Kategori Pangan Olahan (50%)
10. Spesifikasi & Penggunaan Bahan Dasar Permen Karet/Gum Base (50%)

III. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

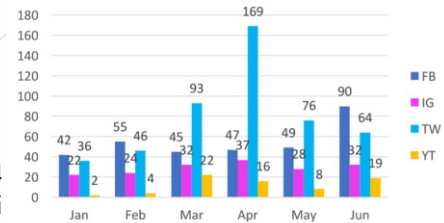
BPOM melakukan fungsi pengawasan tiga lapis, yaitu produsen, pemerintah dan masyarakat. Sebagai salah satu pilar dalam pengawasan obat dan makanan, masyarakat harus terus diedukasi dan diberi informasi yang benar tentang keamanan obat dan makanan agar dapat melindungi dirinya sendiri dari risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu.

BPOM melakukan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi termasuk dengan memanfaatkan pers/media. BPOM telah menerbitkan 16 Siaran Pers, dan 3 penjelasan/klarifikasi berita terkait hoax yang dipublikasikan juga melalui website dan media sosial BPOM. Selain itu dilaksanakan juga 4 kali talkshow atas permintaan media televisi dan 20 kali wawancara Pimpinan BPOM dengan media.

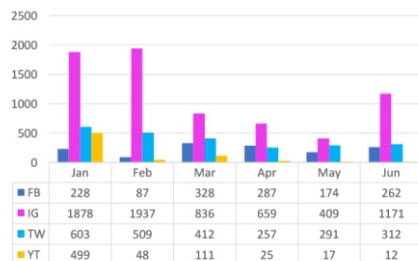
BPOM juga melakukan penyebaran informasi melalui media sosial melalui akun of cial Facebook Fanpage, Twitter, Instagram dan YouTube. Hasilnya performa media sosial BPOM mampu menggerakkan jumlah followers secara positif.

BPOM juga melakukan penyebaran informasi melalui media sosial melalui akun of cial Facebook Fanpage, Twitter, Instagram dan YouTube. Hasilnya performa media sosial BPOM mampu menggerakkan jumlah followers secara positif.

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, aktivitas *maintaining* media sosial pada 4 platform media sosial yaitu facebook, instagram, twitter dan youtube mengalami peningkatan dibanding triwulan I tahun 2019. Rata-rata post sepanjang triwulan II masih sama dengan triwulan I tahun 2019 adalah 1-2 posting perhari. Namun demikian total posting keempat platform pada triwulan II tahun 2019 meningkat sebanyak 635 posts dibanding triwulan I tahun 2019 sejumlah 423 posts.



Gambar 12. Total Posts by Network sampai dengan TW II 2019



Gambar 13. Total Audience by Network sampai dengan TW II 2019

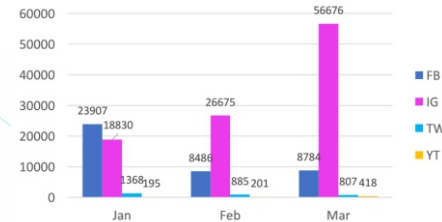
Pada triwulan ini, *twitter* masih menjadi platform yang paling aktif dengan 309 tweets, disusul facebook 176 posts, instagram 97 posts, dan youtube 43 video. Sedangkan triwulan I total 175 tweets, disusul facebook dengan 142 posts, instagram dengan 70 posts dan terakhir youtube dengan penayangan 28 video.

Sementara itu pertumbuhan *audience* pada triwulan II tahun 2019, terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni 3.876 audiences dibanding periode triwulan I tahun 2019 sebanyak 7.476 audiences. Penurunan signifikan terjadi pada *instagram* 2.239 audiences, diikuti *twitter* 860 audiences, *youtube* 54 audiences. Sedangkan *facebook* mengalami peningkatan 723 audiences. Secara total audiences *instagram* hingga triwulan II tahun 2019 mencapai 66K, disusul *twiter* 30K, *facebook* 9K, dan *youtube* 948.

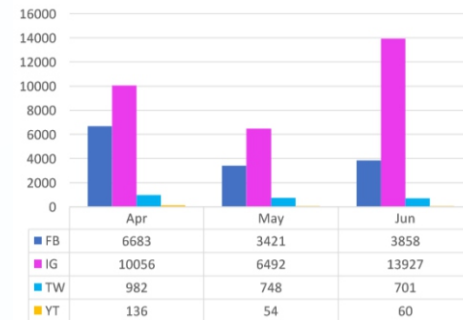
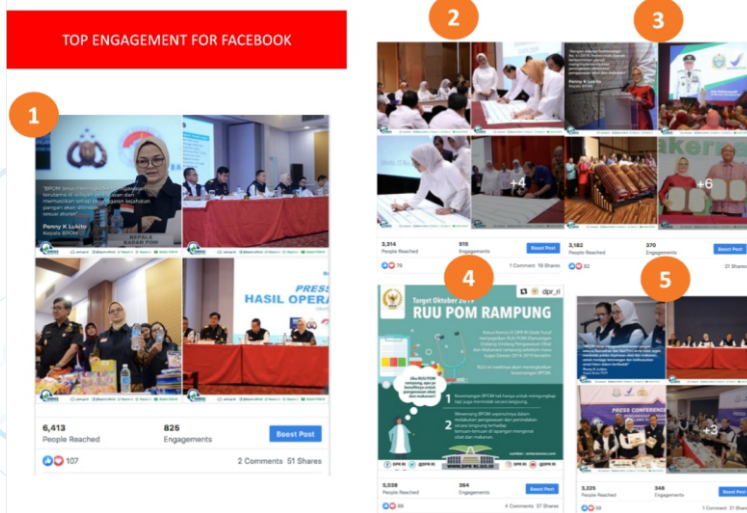


Aktivitas media sosial paling aktif dengan pertumbuhan engagement paling tinggi terjadi pada platform instagram sebanyak 30.475 engagement, facebook 13.962 enmgagement, twitter sebanyak 2.431 engagement, dan youtube sebanyak 250 engagement. Pertumbuhan engagement instagram tertinggi di Juni, disusul April dan Mei. Sedangkan facebook tertinggi pada April disusul Juni dan Mei. Secara keseluruhan engagement tertinggi pada semua platform terjadi di bulan Juni, disusul April dan Mei.

Secara keseluruhan selama triwulan I hingga triwulan II tahun 2019, engagement tertinggi terjadi pada Maret, dan terendah pada Mei. Top engagement facebook kategori most liked terdapat pada konten Greetings Selamat Ulang Tahun Presiden, kategori most commented pada konten repost RUU POM, kategori most engaged users dan most shared pada konten Operasi Opson.



Gambar 14. Total Engagement TW I 2019



Gambar 15. Total Engagement TW II 2019

Top engagement facebook kategori most liked terdapat pada konten Greetings Selamat Ulang Tahun Presiden, kategori most commented pada konten repost RUU POM, kategori most engaged users dan most shared pada konten Operasi Opson.

Pada *instagram*, konten Hari Keamanan Pangan Dunia menjadi *top engagement*. Secara detail *top engagement* kategori *most liked*, *most impressions*, dan *most commented* terdapat pada konten Kuis Keamanan Pangan. Sedangkan kategori *most reach* pada konten Pernyataan Kepala BPOM terkait Hari Keamanan Pangan Dunia.

Pada *twitter*, *tweet* mengenai Hari Keamanan Pangan Dunia merupakan *tweet* dengan *engagement user* tertinggi dalam bentuk *retweet* (25 *retweets*), *tweet* Intensifikasi Pengawasan Pangan Ramadhan menjadi konten terbanyak *likes* (36 *likes*).

Video *youtube* BPOM selama periode triwulan II tahun 2019 dengan *engagement rate* tertinggi yaitu Operasi OPSON dengan jumlah *view* mencapai 119 *views* dan 7 *likes*.

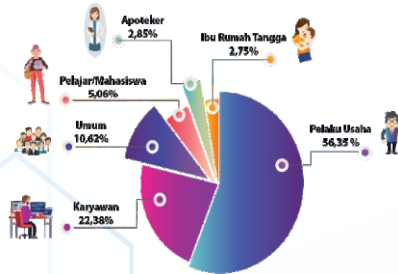
Dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, telah dibentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang merupakan media komunikasi dua arah antara BPOM dan masyarakat. ULPK merupakan saluran penyampaian saran, pertanyaan, informasi, dan pengaduan masyarakat kepada BPOM.

Data layanan informasi dan pengaduan masyarakat pada triwulan II tahun 2019, menunjukkan BPOM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia serta melalui *Contact Center* HaloBPOM1500533 sebanyak 16164 layanan, dimana 15618 (96,62%) layanan permintaan informasi dan 546 (3,38%) layanan pengaduan.

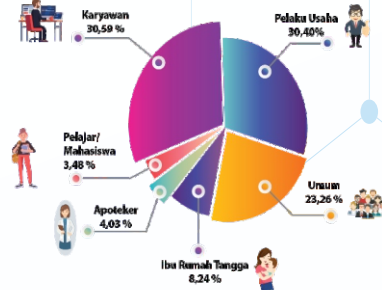


Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 8800 (56,38%) layanan dan karyawan sebanyak 3496 (22,38%) layanan. Adapun layanan pengaduan sebagian besar dari karyawan sebanyak 167(30,59%) layanan dan pelaku usaha sebanyak 166 (30,40%) layanan.

DATA LAYANAN INFORMASI BERDASARKAN PROFESI

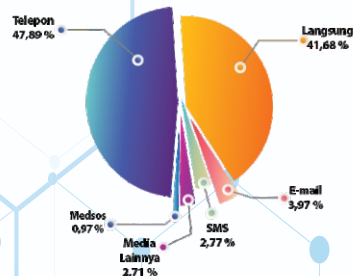


DATA LAYANAN PENGADUAN BERDASARKAN PROFESI

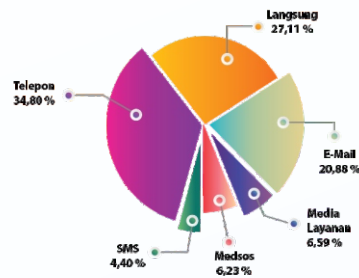


Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui telepon sebanyak 7480 (47,89%) layanan dan datang langsung sebanyak 6509 (41,68%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam penyampaian pengaduan yaitu telepon sebanyak 190 (34,80%) layanan dan datang langsung sebanyak 148 (27,11%) layanan.

DATA LAYANAN INFORMASI BERDASARKAN MEDIA

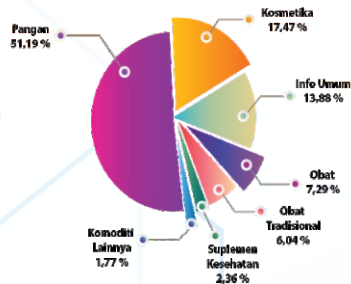


DATA LAYANAN PENGADUAN BERDASARKAN MEDIA

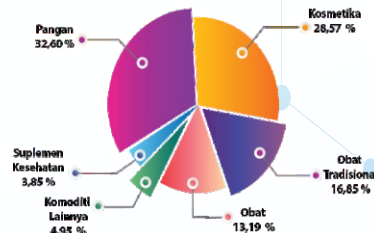


Komoditi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 7995 (51,19%) layanan dan kosmetika sebanyak 2729 (17,47%) layanan. Adapun komoditi yang banyak diajukan yaitu pangan sebanyak 178 (32,60%) layanan dan kosmetika sebanyak 156 (28,57%) layanan.

DATA LAYANAN INFORMASI BERDASARKAN KOMODITI

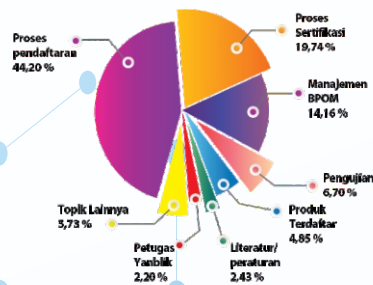


DATA LAYANAN PENGADUAN BERDASARKAN KOMODITI

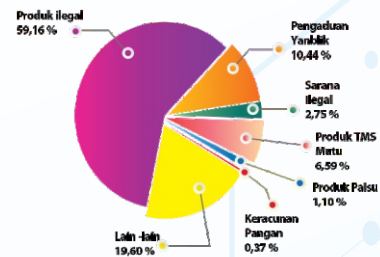


Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu informasi terkait proses pendaftaran sebanyak 6903 (44,20%) layanan, proses sertifikasi sebanyak 3083 (19,74%) dan manajemen BPOM sebanyak 2211 (14,16%) layanan. Adapun topik pengaduan yang banyak diajukan sebagian besar yaitu tentang inspeksi sebanyak 243 (44,51%) layanan.

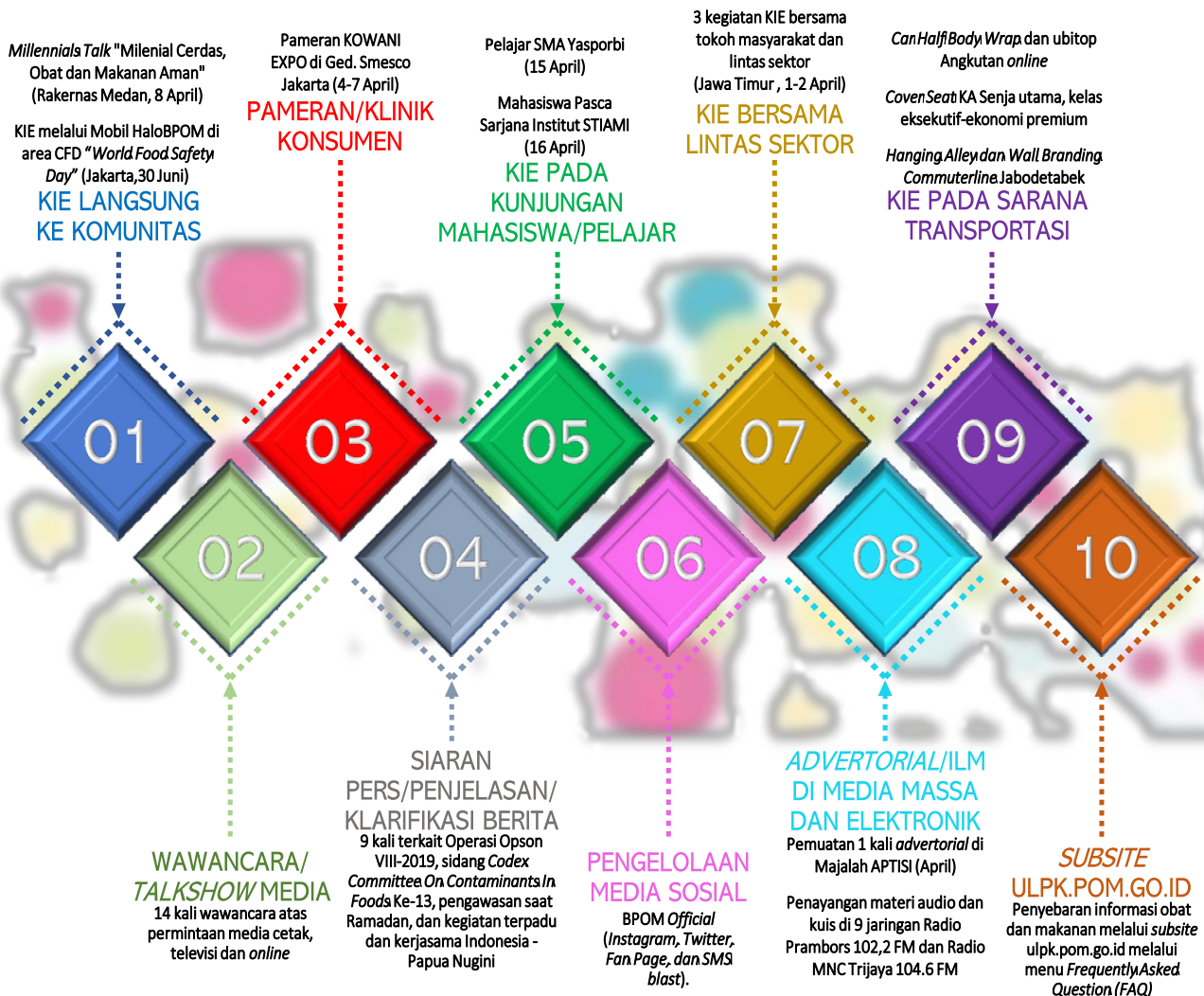
DATA LAYANAN INFORMASI BERDASARKAN TOPIK



DATA LAYANAN PENGADUAN BERDASARKAN TOPIK



Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2019



IV. Pengembangan Aplikasi e-BPOM

Data Master Parameter List

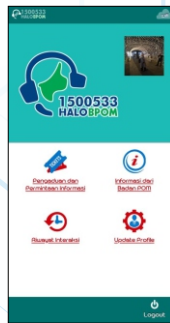
Kategori	Tempat	Kategori II	Kategori III	Kategori IV	Kategori V	Tahun
<input type="checkbox"/> Tampilkan Lebih Banyak <input type="button" value="Ganti"/> <input type="button" value="Reset Filter"/>						
<input type="checkbox"/> KEMDIT	TULANG	KATODOR I	KATODOR II	KATODOR III	KATODOR IV	KATODOR V
<input type="checkbox"/> idm	JAK	DERMATOLOGIS	HYDROKORTISONE ASETATE, NEMOSON BISOLATE	Topikal	KRM	2019
<input type="checkbox"/> idm	JAK	DERMATOLOGIS	HYDROKORTISONE ASETATE, NEMOSON BISOLATE	Topikal	KRM	2019
<input type="checkbox"/> idm	JAK	DERMATOLOGIS	HYDROKORTISONE ASETATE, NEMOSON BISOLATE	Topikal	KRM	2019

Master Data Prioritas Sampling tahun 2019 pada aplikasi SIPT versi 2

Mobile Message List

Ticket ID	Type Source	Customer Name	User ID	Created Time	Reply By	Reply Time	Message	Handle By	Handle Time	Total Read	Total Message	Status Message	Note
201902270003	MTTAC	Roni Ahmad Hartono	22351	2019-02-21 16:57:27	AGENT_JCO	2019-02-21 16:57:27	Nama produk Jakte Pigei Wu Mi Putih		2019-02-21 16:57:27	0	1	CLOS	
201902260001	MTTAC	Novi	21989	2019-02-19 09:57:25	AGENT_JCO	2019-02-19 09:58:26	Nama produk ketoprana 3.1ml (susu)		2019-02-20 14:44:21	0	2	CLOS	
201902260002	MTTAC	gandawati	21989	2019-02-19 09:58:26	AGENT_JCO	2019-02-20 12:51:21	Nama produk selipin bebekwani (susu)		2019-02-20 15:15:20	0	2	CLOS	
201902260003	MTTAC	alf	22163	2019-02-18 21:59:49	AGENT_JCO	2019-02-18 21:59:49	Nama produk Herawan for baby (susu)		2019-02-20 15:12:01	0	1	CLOS	
201902260004	MTTAC	hendawati	22029	2019-02-18 17:54:27	AGENT_JCO	2019-02-18 17:54:27	Nama produk napa. lily (1142) (susu)		2019-02-20 15:14:43	0	1	CLOS	
201902260005	MTTAC	Reza Andria	22011	2019-02-18 16:28:23	AGENT_JCO	2019-02-18 16:28:23	Nama produk (Bak. Argin. Me. (susu))		2019-02-20 15:16:22	0	1	CLOS	
201902260006	MTTAC	Herang engang erlanita	21545	2019-02-14 12:43:10	AGENT_JCO	2019-02-14 12:43:10	Nama produk Lunikid craisn ny (susu)		2019-02-15 14:42:52	0	1	CLOS	
201902270004	MTTAC	Herang Sukanta	21979	2019-02-13 16:22:22	AGENT_JCO	2019-02-13 16:22:22	Nama produk Quanta 100. lily. Dan		2019-02-21 08:16:27	0	1	CLOS	
201902260007	MTTAC	idm	19441	2019-02-13 02:35:28	AGENT_JCO	2019-02-13 02:35:28	Nama produk. Trak argin. Me. (susu)		2019-02-13 02:35:28	0	1	OPEN	
201902260008	MTTAC	idm	19441	2019-02-08 23:38:19	AGENT_JCO	2019-02-08 23:38:19	Nama produk. Trak argin. Me. (susu)		2019-02-08 23:38:19	0	1	OPEN	
201902260009	MTTAC	idm	19441	2019-02-08 23:38:12	AGENT_JCO	2019-02-08 23:38:12	Nama produk. Trak argin. Me. (susu)		2019-02-08 23:38:12	0	1	OPEN	
201910100001	MPOM	Anisa Budi-mulyati	Anisa_Budi	2019-10-01 01:46:57	AGENT_JCO	2019-10-10 10:38:52	Bahan informasi untuk IBE OKI (susu)		2019-10-10 10:38:52	2	5	CLOS	
201910100002	MPOM	rahmatulhadi	rahmatulhadi	2019-10-10 09:00:00	AGENT_JCO	2019-10-10 09:00:00	Informasi untuk IBE OKI (susu)		2019-10-10 09:00:00	0	1	OPEN	

Contact center sudah terintegrasi dengan Track and Trace AntiCounterfeit Control (TTAC). Jika data dari TTAC di alirkan ke Halo BPOM maka pertanyaan tersebut akan di balas oleh agent contact center



Aplikasi Halo BPOM Mobile sudah ada di playstore dan sudah dilakukan update pada menu-menu Halo BPOM

Tools Penawasan berupa Aplikasi Mobile:

Aplikasi dapat diperoleh pada:

Google Play | App Store

Aplikasi dapat digunakan oleh pelaku usaha, masyarakat dan petugas BPOM (menu akan berbeda sesuai dengan pengguna)

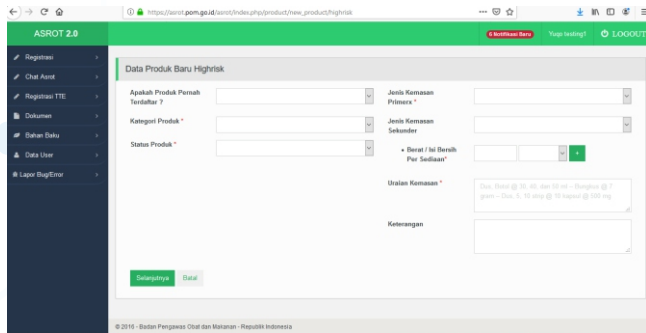
- 1 Menu untuk meminda 2D Barcode
- 2 Menu untuk melihat riwayat pemindaian yang sudah dilakukan
- 3 Menu untuk mengakses berita pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan oleh BPOM
- 4 Menu untuk melakukan pengaduan produk yang tidak ditemukan.

Verifikasi produk terdaftar dengan scan 2d Barcode

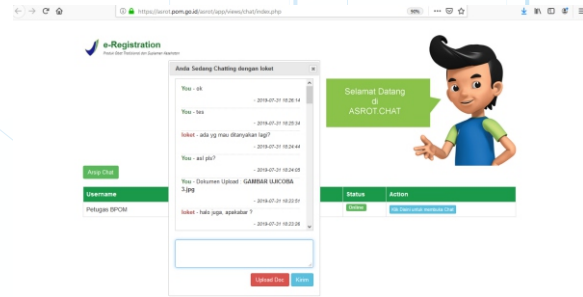
Memperoleh berita dalam genggaman

Pengaduan dan jawaban dari BPOM

Aplikasi BPOM Mobile yang dapat digunakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan melakukan scanning 2D Barcode pada kemasan Obat dan Makanan



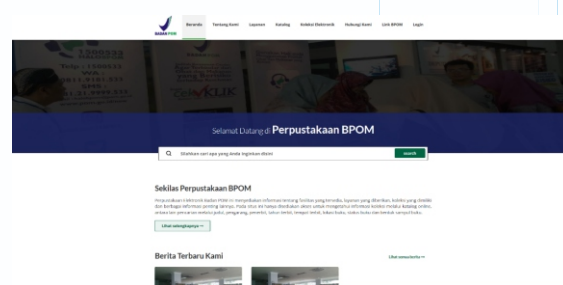
Fitur Pengajuan Registrasi Suplemen Kesehatan High Risk



Fitur Live Chat dengan Loker pada Aplikasi Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan



Capaian Implementasi 2D Barcode



Tampilan Subsite Perpustakaan BPOM setelah Pengembangan Aplikasi



Kegiatan Video Conference BPOM Pusat

V. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, telah ditetapkan 10 (Sepuluh) Peraturan Badan POM, 58 (Lima puluh delapan) Keputusan Kepala Badan POM, 90 (Sembilan puluh) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (Satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 10/9 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1 Judul RUU



Rancangan Undang-Undang:
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

3 Judul RPP



Rancangan Peraturan Pemerintah:
1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

10 Judul Peraturan Badan POM



Peraturan Badan POM :

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPOM
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan BPOM
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan BPOM
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan BPOM
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan BPOM
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor
8. Peraturan Badan POM Nomor 8 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional di Lingkungan BPOM
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan



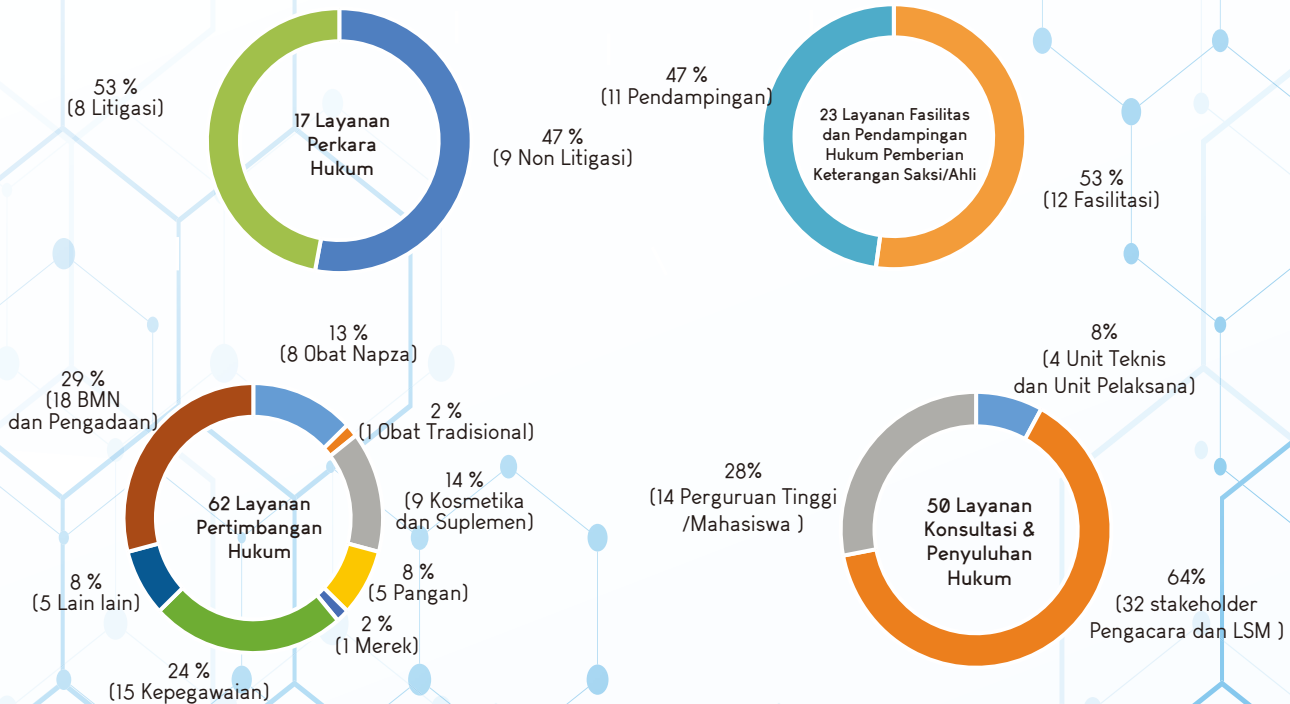
VI. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan sejumlah 152 layanan yang terdiri dari :



VII. Kerjasama Internasional

Kerjasama luar negeri BPOM tidak hanya ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam pengawasan obat dan makanan, namun juga untuk mendukung Agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Berikut kerjasama yang dilakukan BPOM sampai dengan Triwulan I 2019, diantaranya:

1. **28 April - 4 Mei 2019 : Pelaksanaan KSS Timor Leste.** Program KSS tahun 2019 meliputi dukungan fasilitasi kehadiran Delegasi AIFAESA sebagai wakil Timor-Leste pada Pertemuan the 13th Session of Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCCF) di Yogyakarta. Kepala AIFAESA menyampaikan bahwa program KSS BPOM yang telah memberikan manfaat bagi perkuatan inspektur pangan AIFAESA dan menyampaikan harapan bagi keberlanjutan dukungan dan kerja sama Badan POM ke depan. Kepala AIFAESA juga berharap kerja sama tersebut dapat segera diformalkan melalui MoU untuk semakin memperkuat kerja sama diantara kedua belah pihak. Delegasi Timor-Leste melakukan kunjungan ke Balai Besar POM dan UMKM Pangan di Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana proses *Good Manufacturing Practice* (GMP) dilaksanakan sesuai dengan standar Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Di sela-sela Pertemuan CCCC, juga dilakukan pertemuan pembahasan ruang lingkup kerja sama pada *draft* MoU antara Badan POM dengan AIFAESA dengan saran dan tindak lanjut yaitu menyampaikan rekomendasi terkait sistem pengawasan pangan yang akan dikembangkan di Timor-Leste yang sejalan dengan prioritas dengan tetap merujuk standar internasional (Codex) dan memperkuat kerja sama melalui MoU dengan ruang lingkup yang disesuaikan dengan kebutuhan AIFAESA dan kemampuan Badan POM.
2. **20-28 Mei 2019 : Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke Rusia, Jenewa, dan Ceko.**
 - a) **Kunjungan Kerja ke Moskow, Rusia tanggal 21-22 Mei 2019**

Kunjungan kerja ke Rusia bertujuan untuk menjajagi kemungkinan kerja sama dengan Rusia, terutama terkait pengembangan industri *Active Pharmaceutical Ingredients* (API / bahan baku obat), pengembangan obat HIV dan obat-obat kanker, dengan mengunjungi dua (2) perusahaan yaitu PT Hetero dan PT. Viriom.
 - b) **Kunjungan Kerja ke Jenewa, Swiss tanggal 23-25 Mei 2019**
 - 1) **Menghadiri Sidang World Health Assembly ke 72 di Swiss;**

Indonesia menyampaikan dukungan kegiatan dalam kerangka “*Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (MSM SFMP)*”. Dalam hal ini, Indonesia dengan dukungan WHO telah melakukan *pilot project* pelaporan obat palsu dan *substandard* oleh tenaga kesehatan. Badan POM juga berperan dalam mencegah suplai obat palsu dan *substandard* melalui internet antara lain melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat Sedangkan pada agenda “*Transparency for improving Access to Medicines*” dibahas pentingnya transparansi terkait besarnya biaya pengembangan dan penetapan harga obat inovasi baru yang masih dilindungi paten, sehingga dapat meningkatkan akses yang berkeadilan (*equitable access*) terhadap obat dan vaksin inovasi baru yang akan memberikan peningkatan harapan kesembuhan bagi pasien. .

2) Pertemuan bilateral dengan WHO

Dalam pertemuan tersebut WHO menyampaikan apresiasi kepada Badan POM atas pengawalan dan pendampingan kepada PT. Biofarma yang memproduksi vaksin untuk kebutuhan program imunisasi, khususnya vaksin Polio yang saat ini sedang dibutuhkan untuk negara-negara di Afrika, selain itu, Badan POM telah berperan baik sebagai *Center of Excellence for WHO Global Learning Organisation* khususnya dalam pelaksanaan pelatihan di bidang Uji Klinik bagi regulator di negara berkembang selama beberapa tahun terakhir. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan *The International Conference of Drug Regulatory Authorities (ICDRAs)* ke-19 tahun 2020.

c) Kunjungan Kerja ke Praha, Ceko tanggal 26 - 29 Mei 2019

1) Pertemuan dengan *National Institute of Public Health - Statni Zdravotni Ustav (SZU)* di Ceko

Pertemuan ini membahas sistem pengawasan kosmetika di Republik Ceko yang juga telah menerapkan harmonisasi dengan seluruh negara anggota Uni Eropa (EU). Sistem aplikasi untuk pengawasan yang digunakan bersifat regional sehingga dapat diakses dari seluruh negara anggota EU.

2) Pertemuan dengan *Schwan-STABILO Cosmetics GmbH & Co. KG* di Ceko

Pada pertemuan dengan *Schwan-STABILO Cosmetics* membahas mengenai tawaran potensi investasi industri kosmetik khususnya pensil kosmetik di Indonesia

Tindak Lanjut

- a) BPOM berperan aktif dalam eradikasi polio melalui program strategis Pengawasan *Pre Market* Registrasi Obat dan Peningkatan *quality assurance* fasilitas industri farmasi sesuai standar Cara Pembuatan Obat yang Baik.
- b) BPOM akan menjajaki kerja sama dengan otoritas obat (*National Regulatory Authority*) Rusia untuk kerjasama pengembangan Industri bahan baku obat di Indonesia dengan mengundang otoritas obat Rusia bersama Industri Farmasi yang tertarik berinvestasi dalam industri bahan baku obat di Indonesia.
- c) BPOM perlu memperkuat keterlibatannya dalam berbagai forum Internasional baik dalam mendukung program-program di bawah WHO maupun dalam penguatan kapasitas pengawasan obat dan makanan.
- d) BPOM akan terus memperkuat jejaring dengan berbagai pihak baik otoritas berwenang di negara tujuan ekspor maupun industri obat dan kosmetik. Pertemuan dengan otoritas kompeten tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengutan sistem pengawasan obat dan kosmetika di Indonesia.
- e) Pertemuan dengan berbagai industri obat dan kosmetik sangat strategis dalam menjaring investasi asing dalam pengembangan industri obat dan kosmetik yang merupakan sektor andalan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035.

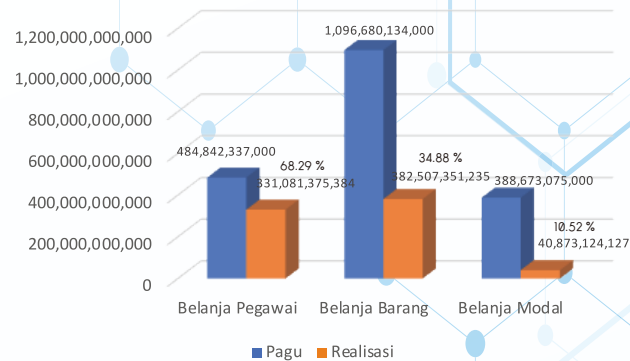
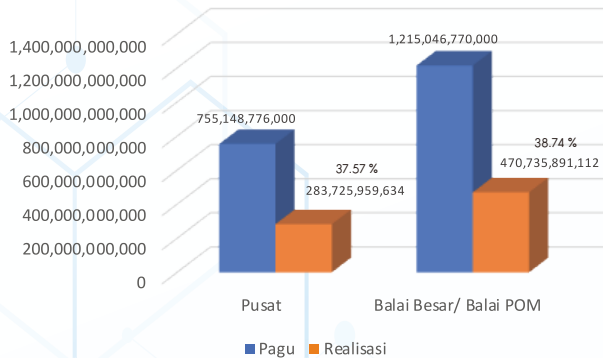
3. **12-24 Juni 2019** : Pelaksanaan Kegiatan Terpadu Pertemuan Regional dalam rangka Kerja Sama dalam negeri di wilayah Perbatasan, Jayapura. Dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah perbatasan, Badan POM menyelenggarakan *Workshop* Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari unit pusat dan Balai Besar/Balai POM dan Loka POM di Wilayah Timur. *Workshop* ditujukan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang kebijakan kerja sama luar negeri Indonesia, serta tata cara persidangan dan etika pergaulan internasional. Selain itu, dilakukan juga diskusi dengan pemangku kepentingan di perbatasan Indonesia-PNG, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait, seperti Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, Administator PLBN, Imigrasi, Bea Cukai, Kemlu. Inisiatif ini diapresiasi pemangku kepentingan dan akan ditindaklanjuti dengan implementasi kerja sama kongkret dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat dan pengembangan potensi ekspor obat dan makanan.
4. **18-19 Juni 2019** : Pelaksanaan KSS PNG, Jayapura. Badan POM telah menyelenggarakan program dukungan pengembangan sistem pengawasan obat di PNG kepada *West Sepik Provincial Health Authority* dan *National Departement of Health, Papua Nugini* pada tanggal 18 Juni sampai dengan 20 Juni 2019 di Jayapura. Program KSS tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan obat kepada otoritas kesehatan Papua Nugini yang saat ini belum memiliki lembaga pengawas obat dan menentukan prioritas kebutuhan regulator dari segi pemenuhan obat yang terjangkau dan berkualitas. Kegiatan KSS diikuti oleh 5 (lima) orang perwakilan dari PNG yang terdiri dari regulator dari Kementerian Kesehatan Papua Nugini dan Otoritas Kesehatan dari West Sepik, Vanimu, Papua Nugini. Dalam pertemuan juga dilakukan penajakan kerja sama untuk memasok obat-obatan ke Papua Nugini. Hal ini untuk dapat membantu pemenuhan obat-obatan yang efektif dan terjangkau dari Indonesia serta mengurangi angka pergerakan obat-obatan ilegal di wilayah perbatasan. Pada kegiatan *knowledge sharing* di Balai Besar POM di Jayapura, peserta KSS menyampaikan apresiasi kepada Badan POM yang dinilai memiliki kapasitas lembaga pengawasan di daerah yang telah kuat dan dapat menjadi rujukan bagi PNG baik dalam pengujian maupun kegiatan pengawasan lainnya. Lebih lanjut, regulator PNG mengharapkan adanya kerja sama antara RI-PNG dalam hal pelatihan kerja lapangan atau *magang* regulator PNG di BBPOM Jayapura maupun penerimaan pengujian sample produk farmasi dari PNG di laboratorium BBPOM Jayapura.

Tindak Lanjut

1. Terkait dengan usulan PNG untuk keterlibatan langsung *High Level Official* PNG (butir 6b), maka kiranya Badan POM dapat memfasilitasi hal tersebut dengan mengagendakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. *Courtesy Call High Level Official* dimaksud kepada Ibu Kepala Badan POM;
 - b. Pembahasan MoU antara Badan POM dan regulator PNG terkait;
 - c. Kunjungan ke beberapa industri farmasi di Jakarta dan Bandung.Kiranya kegiatan ini juga dapat dilakukan bekerja sama dengan industri farmasi terkait.
2. Sebagai kelanjutan dari *Need Assessment* dan *Capacity Building* untuk PNG, kami mengusulkan kiranya untuk tahun depan, KSS Badan POM berupa pelatihan terkait registrasi obat, GMP dan GDP.

VIII. Pengelolaan Anggaran

Alokasi anggaran BPOM tahun 2019 sebesar Rp1.970.195.546.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran tersebut terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal yang tersebar untuk 10 Satker Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM. Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2019 sebesar Rp754.461.850.746,- (38,29%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 10 Satker Pusat Rp283.725.959.634,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp470.735.891.112,-



IX. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2019. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan II tahun 2019 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2015-2019 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
1.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama	61	Indeks	-	-
		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	71	%	-	-
		Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91	Dokumen	45	49,45
		Indeks kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan	60	Indeks	-	-
		Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3	Kerjasama	1	33,33
		Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80	%	-	-
		Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95	%	-	-
		Nilai AKIP Biro Kerjasama	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72,4	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	nilai	WTP	100,00
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85,25	nilai	93,19	109,31
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100	%	42,75	42,75
		Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	%	60,00	60,00
		Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	40,00	40,00
		Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
1.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,3	nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,3	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100	%	83	83,00
		Ratio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100	%	50	50
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	%	63.08	63.08
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	%	100	100,00
		Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
1.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan wartawan	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	65	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Humas dan DSP	65	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hmas dan DSP	100	%	100	100,00
		Persentase KIE yang dilaksanakan terhadap target	100	%	67,69	67,69
		Rasio pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	87	%	99,80	114,71
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan manajemen eselon 1	65	Indeks	77,15	118,69
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	93	%	96,12	103,35
		Persentase permintaan informasi dari media yang ditindaklanjuti	61	%	76,92	126,10
		Nilai AKIP Biro Humas dan DSP	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
1.5	Pengelolaan SDM BPOM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,22	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan layanan rumah tangga	3,2	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan layanan kepegawaian	3,2	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Umum dan SDM	84	%	75,00	89,29
		Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85	%	96,84	113,93

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.5	Pengelolaan SDM BPOM	Persentase SDM BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai perencanaan	72	%	42,13	58,51
		Nilai AKIP Biro Umum dan SDM	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
1.6	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi terhadap total SDM	75	%	80,81	107,75
		Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	3,85	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase ketersediaan dokumen Pengembangan Kompetensi terhadap rencana induk Pengembangan Kompetensi	66	%	37,87	57,38
		Persentase SDM yang dinilai kompetensinya terhadap target SDM yang dinilai pada tahun berjalan	85	%	61,94	72,87
		Persentase SDM yang dikembangkan kompetensinya terhadap total SDM BPOM	75	%	27,67	36,89
		Nilai penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sesuai Kirk Patrick	3,88	Nilai	3,930	101,29
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM terkait Manajemen Perubahan	90	%	50,00	55,56
		Nilai Akreditasi Lembaga Diklat	C	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.7	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Presentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100	%	50,00	50,00
		Nilai SPBE	meningkat		2,44	2,44
		SLA Layanan TIK	meningkat		100,00	100,00
		Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK	60	%	21,00	35,00
		Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	68	%	80,00	117,65
		Persentase sistem informasi yang sesuai standar	40	%	13,33	33,33
		Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar	100	%	75,00	75,00
		Sertifikat ISO 27001	1	Sertifikat	0,00	0,00
		Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur	100	%	100,00	100,00
		Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100	%	25,00	25,00
		Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan	100	%	5,00	5,00
		Nilai performa website BPOM	75	%	69,00	92,00
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	72	nilai	akhir tahun	akhir tahun
2.1	Pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan Pengelolaan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	72	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Satker yang mengelola BMN dengan Baik	89	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai kebutuhan	90	%	50,43	56,03
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	Nilai RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	10	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,60	Nilai	7,63	88,72
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	84,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/ WBBM	12,00	Unit Kerja	20	166,67
3.1	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75	%	100	133,33
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	84	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
3.1	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92	%	0	0,00
		Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	87		akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	Laporan	12	52,17
		Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material (WTP)	100	%	100	100,00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	78	%	88,62	113,62
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	87	%	97,95	112,59
		Nilai AKIP Inspektorat I	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
3.2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,5	Nilai	11,15	96,96
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	75	%	0	0,00
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75	%	100	133,33
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
3.2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	90,5	Nilai	90,43	100,98
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75	%	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK=20; WBBM= 4	Unit Kerja	20	83,33
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92	%	0	0,00
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100	%	100	100,00
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85	%	99,81	117,42
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85	%	78,00	91,76
		Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	Laporan	13	56,52
		Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100	%	62	62,00
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	90	%	86,15	95,72

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
3.2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai AKIP	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Level Kapabilitas APIP	level 3	Level	level 3	100,00
4	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	46,95	Rasio	34,49	73,46
		Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	50	%	akhir tahun	akhir tahun
4.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Indeks POM	71	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase obat yang memenuhi syarat	94	%	96,38	102,53
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	60	%	93,00	155,00
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	80	%	98,54	123,18
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	87	%	99,40	114,25

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase makanan yang memenuhi syarat	71	%	82,70	116,48
		Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	66	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	%	85,96	85,96
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM	41,8	%	29,99	71,75
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM	49,8	%	48,69	97,77
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	%	92,75	111,75
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM	46,95	Rasio	27,82	59,25
		Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50	%	31,86	63,72

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Nilai AKIP BBPOM/BPOM	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100	%	0	0,00
		Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	2	dokumen	0	0,00
		Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman dan sesuai prosedur	20	dokumen	11	55,00
		Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	3	kajian	Progres 40%	Progres 40%
		Persentase pelaku usaha/komunitas yang mengikuti kegiatan penggalangan	80	%	0	0,00
		Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana sesuai prosedur	12	dokumen	6	50,00
		Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		4.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase hasil intelijen Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	75	%
Persentase laporan intelijen obat dan makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti	75	%		54,54	72,72	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.3	Intelijen Obat dan Makanan	Jumlah profil jaringan intelijen obat dan makanan	2	Profil	1	50,00
		Persentase hasil patroli siber yang ditindaklanjuti secara tepat	55	%	46,34	84,25
		Persentase kegiatan intelijen yang akurat	70	%	60	85,71
		Jumlah jejaring intelijen di bidang obat dan makanan	7	jumlah	3	42,86
		Jumlah basic descriptive intelligent di bidang obat dan makanan yang akurat	18	jumlah	8	44,44
		nilai AKIP Direktorat Intelijen	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah basic descriptive intelligent di bidang obat dan makanan yang akurat	18	jumlah	8	44,44
		nilai AKIP Direktorat Intelijen	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	23,5	%	48,80	207,66
		Persentase sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	66	%	73,07	110,71
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	85	%	86,61	101,89
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	85	%	96,42	113,44

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	87	%	95,50	109,77
		Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan	61	%	52,05	85,33
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan OT dan SK yang dilaksanakan	61	Rasio	51,71	84,77
		Persentase keputusan hasil pengawasan OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	56	%	73,15	130,63
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	%	81,88	134,23
		Persentase laporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	83	%	97,59	117,58

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	81	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	56	%	73,15	130,63
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	%	81,88	134,23
		Persentase laporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	83	%	97,59	117,58
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	81	%	akhir tahun	akhir tahun
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan OT dan SK yang dilaksanakan	61	Rasio	51,71	84,77
		Persentase keputusan hasil pengawasan OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	56	%	73,15	130,63
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil	61	%	81,88	134,23

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase laporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	83	%	97,59	117,58
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	81	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	56	%	73,15	130,63
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	%	81,88	134,23
		Persentase laporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	83	%	97,59	117,58
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	81	%	akhir tahun	akhir tahun
4.5	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase sarana produksi dan distribusi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang memenuhi ketentuan	62	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.5	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi baru yang memenuhi syarat	87	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan teknologi Baru	79,17	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha sarana produksi dan distribusi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	70	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik terkait pengawasan sarana produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	76,7	Rasio	5,88	7,67
		Tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pembinaan terkait Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang diberikan	80	Nilai	83,33	104,16
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang dilaksanakan	27	Rasio	47,76	176,89
		Persentase Keputusan hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru yang diselesaikan tepat waktu	94	%	90,03	95,78
		Persentase Sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil	92	%	45,38	49,33

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetik	62	%	73,33	118,27
		Persentase laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	67	%	31,98	47,73
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Kosmetik	81		akhir tahun	akhir tahun
4.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase kesesuaian pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP oleh BB/BPOM dan Loka POM	65	%	70,84	108,98
		indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	76	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	75	%	97,96	130,61
		jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat	1	Teknologi Informasi	1,00	100,00
		jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB	600	pelaku usaha	478,00	79,67

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu	80	%	85,21	106,51
		Jumlah petugas BB/BPOM, Petugas Lintas Sektor, dan Pengelola Saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi	600	petugas	293,00	48,83
		nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat	1	Teknologi Informasi	1,00	100,00
		jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB	600	pelaku usaha	478,00	79,67
		Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu	80	%	85,21	106,51
		Jumlah petugas BB/BPOM, Petugas Lintas Sektor, dan Pengelola Saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi	600	petugas	293,00	48,83
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase keputusan hasil pengawasan keamanan, mutu dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif yang ditindaklanjuti	55	%	79,18	143,96
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	72	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor	55	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan industri rokok dalam ketentuan iklan dan label produk tembakau	55	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase penyelesaian permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	99	%	98,89	99,89
		Tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pembinaan terkait keamanan, mutu dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	87	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif yang dilaksanakan	55	%	39,45	71,73

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase tindak lanjut pengawasan mutu, label, iklan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	55	%	38,12	69,31
		Persentase laporan farmakovigilans yang ditindaklanjuti	75	%	75,04	100,05
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	75000	Iklan dan label	28416	37,89
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.9	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Persentase sarana produksi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang memenuhi ketentuan	48	%	35,55	74,06
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang memenuhi ketentuan	48	%	65,60	136,67
		Persentase Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang memenuhi syarat	85	%	85,18	100,21
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	72	indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.9	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Indeks kepatuhan sarana produksi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	55	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan sarana distribusi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	55	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik terkait sarana Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	90	Rasio	100,00	111,11
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik terkait produk Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	90	Rasio	100,00	111,11
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan produk/sampling Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang dilaksanakan	55	rasio	54,94	99,89
		Persentase keputusan hasil pengawasan pangan risiko rendah dan sedang yang diselesaikan tepat waktu	94	%	91,61	97,46
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82	%	0,00	0,00
		Nilai AKIP Dit.PRRS	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	70	%	70,00	100,00
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat, NPP	85	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah Industri Farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	13	industri	2,00	15,38
		Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu	60	%	51,11	85,18
		Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	80	%	20,62	25,78
		Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat	90	%	30,33	33,70
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	87	%	67,42	77,49
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	79	Indeks	83,96	106,28

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan	76	%	95,63	125,83
		Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan	6	Dokumen	0,00	0,00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0,9	Nilai	0,99	110,00
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00
		Tingkat efektivitas pendampingan	87	%	88,80	102,07
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.12	Registrasi Obat	Persentase keputusan registrasi obat yang diterbitkan tepat waktu terhadap obat yang diselesaikan	67	%	66,99	99,99
		Persentase keputusan evaluasi pengembangan obat yang diterbitkan tepat waktu	82	%	84,05	102,50
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	78	indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan	76	%	95,63	125,83
		Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan	6	Dokumen	0,00	0,00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0,9	Nilai	0,99	110,00
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00
		Tingkat efektivitas pendampingan	87	%	88,80	102,07
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.12	Registrasi Obat	Persentase keputusan registrasi obat yang diterbitkan tepat waktu terhadap obat yang diselesaikan	67	%	66,99	99,99
		Persentase keputusan evaluasi pengembangan obat yang diterbitkan tepat waktu	82	%	84,05	102,50
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	78	indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.12	Registrasi Obat	Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan registrasi obat	25	%	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah usulan penyusunan/revisi pedoman, standar, kriteria dan prosedur registrasi Obat	3	dokumen	1,00	33,33
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi obat	68	Rasio	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah pelayanan konsultasi dan advokasi registrasi obat	120	layanan	85,00	70,83
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	71	%	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi Obat	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Keputusan Registrasi Obat Tradisional, yang diselesaikan tepat waktu	75	%	59,36	79,15
		Persentase Keputusan Registrasi Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu.	65	%	67,90	104,46
		Persentase keputusan Registrasi Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82	%	66,37	80,94
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional	75	indeks	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Suplemen Kesehatan	75	indeks	0,00	0,00
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang notifikasi Kosmetik	75	indeks	0,00	0,00
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Penilaian Uji Pra Klinik/ Klinik dan DIP	75	indeks	0,00	0,00
		Persentase kesesuaian dokumen registrasi OT, SK dan notifikasi Kosmetik terhadap persyaratan yang ditetapkan	88	%	93,55	106,31
		Jumlah dokumen identifikasi registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP	7	Dokumen	5,00	71,43
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional	69	Rasio	0,00	0,00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Suplemen Kesehatan	69	Rasio	0,00	0,00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang notifikasi Kosmetik	69	Rasio	0,00	0,00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang penilaian Uji PraKlinik / Klinik dan DIP	69	Rasio	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Tingkat efektivitas pendampingan (indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pendampingan/ bimbingan/ pembinaan)	75	nilai	67,29	89,72
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	70,5	%	100,00	141,84
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.14	Standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Persentase standar obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dimanfaatkan	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kesesuaian standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentasi permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan Manfaat Obat Tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	75	%	92	122,67
		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan standar OT, SK dan Kosmetik	1	dokumen	1	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.14	Standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Persentasi sosialisasi yang dilaksanakan dibanding dengan yang direncanakan	80	%	10	12,50
		Persentase standar OT, SK, dan Kosmetik yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	80	%	70	87,50
		Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan. dan Kosmetik	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.15	Standardisasi Pangan Olahan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	85	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kesesuaian standar pangan olahan	90	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	80	%	97,25	121,56
		Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	14	standar	Progres 44,29%	Progres 44,29%
		Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibanding dengan yang direncanakan	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	100	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.15	Standardisasi Pangan Olahan	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase Standar Obat dan NAPPZA yang dimanfaatkan	80	%	0	0,00
		Persentase Rancangan Standar Obat NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan	70	%	0	0,00
		Indeks kesesuaian standar Obat NAPPZA	80	indeks	0,26	0,33
		Indeks kesesuaian rancangan standar Obat NAPPZA	80	indeks	0,34	0,43
		Jumlah kebutuhan standar Obat NAPPZA	13	Kebutuhan standar	13	100,00
		Persen sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	81	%	39,22	48,42
		Persentase rancangan standar dan standar Obat NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan	80	%	10,50	13,13
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk Direktorat Standardisasi Obat NAPPZA	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Jumlah rancangan dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,	22	Dokumen	16,00	72,73

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Persentase Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif sesuai perencanaan	100	%	86,67	86,67
		Persentase pegawai yang mengimplementasikan manajemen kinerja di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100	%	100,00	100,00
		Persentase UMKM pangan yang memahami keamanan pangan	75	%	10,19	13,59
		Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan	61	indeks	0,00	0,00
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	61	indeks	0,00	0,00
		Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPPIRT	30	%	Progres 25%	Progres 25%
		Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)	80	%	Progres 48%	Progres 48%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan	2	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kader keamanan pangan yang memahami prinsip keamanan pangan	80	%	20	25,00
		Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase peningkatan kemampuan pengujian Laboratorium BPOM terhadap standar/peraturan yang ditetapkan	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar Good Laboratory Practices yang ditetapkan	85	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan terhadap standar	65	%	62,30	95,85
		Persentase pemenuhan Baku Pembanding sesuai kebutuhan	73	%	69,12	94,68
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar yang ditetapkan	72	%	41,27	57,32
		Persentase sampel produk biologi dan toksikologi yang diuji sesuai Service Level Agreement	90	%	89,22	99,13
		Persentase penyelesaian pengujian sampel kasus	100	%	91,86	91,86

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Nilai AKIP PPOMN	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Status akreditasi	1	sertifikat	0,00	0,00
4.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Indeks efektivitas penyidikan obat dan makanan	50	Indeks	0	0,00
		Persentase perkara obat dan makanan ilegal yang terungkap aktor intelektualnya	50	%	30	60,00
		Tingkat efektivitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan	0,7	Nilai	0	0,00
		persentase penyelesaian perkara tindak pidana hasil operasi penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan hingga tahap II	65	%	42,85	65,92
		Nilai AKIP Direktorat Penyidikan	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase hasil riset dan kajian Obat dan Makanan sesuai kebutuhan organisasi	100	%	Progres 41,42%	Progres 21%
		Jumlah dokumen rencana induk riset dan kajian Obat dan Makanan	1	Dokumen	1	100,00
		Persentase riset dan kajian yang dilaksanakan sesuai dengan rencana induk	100	%	100	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian yang diselenggarakan sesuai dengan timeline	100	%	0	0,00
		Persentase hasil riset dan kajian yang didiseminasikan ke stakeholder	100	%	0	0,00
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

LAMPIRAN II

SERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(Per 30 Juni 2019)

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	432731 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	359.611.361.000	142.015.063.668	39,49%
3158	BIRO KERJASAMA	7.525.900.000	2.218.578.496	29,48%
3159	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	28.279.300.000	8.211.217.259	29,04%
4110	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	12.429.149.000	4.393.585.630	35,35%
4111	BIRO HUMAS DAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	29.000.000.000	8.638.848.310	29,79%
	BIRO UMUM DAN SDM	282.377.012.000	118.552.833.973	41,98%
3164	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	68.468.001.000	10.830.382.345	15,82%
4112	Pengelolaan SDM BPOM	213.909.011.000	107.722.451.628	50,36%
2	445155 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	51.836.895.000	20.305.528.233	39,17%
4122	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	9.833.970.000	4.264.405.045	43,36%
4123	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	11.025.670.000	4.238.553.164	38,44%
4125	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	10.254.400.000	4.018.496.832	39,19%
4127	DIT. REGISTRASI OBAT	10.810.000.000	3.478.721.754	32,18%
4131	DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	9.912.855.000	4.305.351.438	43,43%
3	445161 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	41.096.377.000	14.217.106.237	34,59%
4119	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	12.366.155.000	4.300.301.988	34,77%
4121	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	11.240.866.000	3.598.830.794	32,02%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
3	445161 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	41.096.377.000	14.217.106.237	34,59%
4128	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	11.334.528.000	4.069.249.237	35,90%
4129	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	6.154.828.000	2.248.724.218	36,54%
4	445170 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	58.870.422.000	18.222.399.305	30,95%
4120	DIT. PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	9.553.024.000	3.129.642.928	32,76%
4124	DIT. PENGAWASAN PANGAN OLAHAM RISIKO RENDAH DAN SEDANG	14.965.142.000	5.279.298.945	35,28%
4126	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8.979.000.000	2.617.143.017	29,15%
4130	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	10.744.033.000	3.190.411.479	29,69%
4132	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	14.629.223.000	4.005.902.936	27,38%
5	632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	41.432.389.000	10.918.274.794	26,35%
4117	DIT. PENGAMANAN	22.033.980.000	3.658.099.213	16,60%
4118	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	9.250.000.000	2.561.866.481	27,70%
4134	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	10.148.409.000	4.698.309.100	46,30%
6	INSPEKTORAT UTAMA	22.124.859.000	12.348.327.641	55,81%
4115	INSPEKTORAT I	15.433.969.000	9.012.652.203	58,39%
4116	INSPEKTORAT II	6.690.890.000	3.335.675.438	49,85%
7	4133 PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	64.960.728.000	22.108.648.794	34,03%

NO	SATUAN KERJA		PAGU	REALISASI	%
9	4114	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	58.019.297.000	19.895.282.548	34,29%
10	4113	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	32.197.794.000	17.333.935.543	53,84%
TOTAL SATKER PUSAT			755.148.776.000	283.725.959.634	37,57%
1		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	44.596.604.000	16.926.784.946	37,96%
2		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	63.079.512.000	32.938.558.601	52,22%
3		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	58.592.933.000	27.001.093.014	46,08%
4		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	40.156.932.000	15.945.470.373	39,71%
5		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	60.927.108.000	27.844.887.614	45,70%
6		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	34.202.501.000	14.453.753.553	42,26%
7		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	51.016.109.000	21.584.395.763	42,31%
8		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	46.105.857.000	18.845.140.556	40,87%
9		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	40.476.321.000	15.950.768.225	39,41%
10		BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	30.567.014.000	10.955.816.822	35,84%
11		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	39.944.864.000	15.691.149.022	39,28%
12		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	31.586.653.000	13.958.753.366	44,19%
13		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	30.559.515.000	11.113.936.407	36,37%
14		BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	27.401.412.000	10.413.648.046	38,00%
15		BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	56.875.828.000	13.568.926.260	23,86%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	30.524.512.000	11.977.574.576	39,24%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	38.404.651.000	12.663.949.943	32,98%
18	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	28.845.331.000	9.918.951.353	34,39%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	54.763.869.000	21.892.298.033	39,98%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	29.213.134.000	9.740.862.771	33,34%
21	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	32.088.241.000	9.944.297.138	30,99%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	40.291.877.000	15.484.204.831	38,43%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	32.871.567.000	14.068.763.699	42,80%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	35.770.249.000	11.742.119.667	32,83%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	36.485.396.000	14.249.717.246	39,06%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	28.916.880.000	12.139.805.952	41,98%
27	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	30.851.282.000	16.632.808.367	53,91%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	26.731.981.000	9.171.837.855	34,31%
29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	20.941.272.000	8.225.506.988	39,28%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	18.340.188.000	7.556.328.619	41,20%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	29.260.880.000	8.330.495.776	28,47%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI	28.093.263.000	6.088.018.312	21,67%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	16.563.034.000	3.715.267.418	22,43%
TOTAL SATKER DAERAH		1.215.046.770.000	470.735.891.112	38,74%
TOTAL SATKER PUSAT DAN DAERAH		1.970.195.546.000	754.461.850.746	38,29%





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2019



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI